

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashidiqqie, Jimly, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendi, A. Masyhur, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Utama, Bogor.
- Effendi, A. Masyhur, dan Taufani Sukmana Evandri, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Interasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2014, *KPK dan Sitem Peradilan Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Kasim, Ifdal, 2005, *Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik*, ELSAM, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kristiadi, J, 2009, *Demokrasi dan Korupsi Politik* dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kurnia, Titon Slamet, 2015, *Interpretasi Hak-hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, 1984, *Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Muhammad, 2014, *Metode Penelittian*, Ghalia, Jakarta.
- Pramono, R. Widyo, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Santosa, Prayitno Iman, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Jakarta.
- Satria, Hariman, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta.
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiarto, Bima Arya, 2009, *Politik Uang dan Pengaturan Dana Politik di Era Reformasi*, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Editor), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunggu, Tumbur Ompu, 2012, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Trianita, Hendriati dalam Suryadi Radjab, 2002, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, PHBI, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanto dan Zachrie, Ridwan (Editor)., *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Alfauzi, Rangga, 2015, *Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Asmi, Andi Nurul, 2018, *Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Damayanti, Rizki Ridha, 2015, *Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hasan, Muhammad Iqbal, 2018, *Analisis Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Terhadap Terpidana Tindak Pidana Korupsi*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Herlambang, Rendy, 2015, *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1195 K/Pid.Sus/2014 Atas Nama Terdakwa LHI*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ibrahim, Aji Lukman, 2017, *Analisis Disparitas Tuntutan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Nurkholisah, Siti, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/Pid.Sus/2014)*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Septian, Jimmy, 2018, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak-Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 36/PID/TPK/2013/PT.DKI)*, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Internet

Anjari, Warih, “Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Komisi Yudisial, <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/37> diakses 4 November 2018

Data KPK, 2019, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Gabrillin, Abba, 2018, Kaleidoskop 2018, 12 “Pencabutan Hak Politik di Pengadilan Tipikor Jakarta”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/17/06432261/kaleidoskop-2018-12-pencabutan-hak-politik-di-pengadilan-tipikor-jakarta>

Hartono, Mimin Dwi, 2017, “Pencabutan Hak Politik Koruptor”, <https://antikorupsi.org/id/news/pencabutan-hak-politik-koruptor>

ICW, 2019, “Laporan Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018”, https://antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf

Media Indonesia, 2019, “Saatnya Koruptor Divonis Maksimal”, http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1597-saatnya-koruptor-divonis-maksimal

Nu’ad, Ismatillah A, 2011, “KPK dan Hukuman Bagi Koruptor”, <https://id.beritasatu.com/home/kpk-dan-hukuman-bagi-koruptor/16617>

Saleh, Muhammad, Dimas Firdausy Hunafa, 2018, “Pemilu Berintegritas: Menggagas Pencabutan Hak Politik Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Dipilih Melalui Pemilihan Umum”, diakses <file:///D:/download/27109-Article%20Text-60107-1-10-20181124.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 140 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3874).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150)

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 165 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. No 3886)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4250)

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846)